



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : DINAS KETAHANAN PANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOMOD SYAFRUDIN
2. Jabatan : KEPALA UNIT
3. NHK : 265961

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.100.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/250 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	141.000.000
1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
2. MOTOR, HONDA ADV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000		
3. MOBIL, NISSAN NISSAN ZUKE Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	106.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	53.441.137
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.400.441.137
III. HUTANG	Rp.	818.995.967
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	581.445.170

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : DINAS KETAHANAN PANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ADE AHMAD KOSASIH
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 265810

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 6.290.750.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 93 m2/186 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 93 m2/93 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. Tanah Seluas 1.159 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI Rp. 347.700.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 840.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 840.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 358 m2/200 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI Rp. 840.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 103 m2/70 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.260.000.000
8. Tanah Seluas 3.603 m2 di KAB / KOTA LEBAK, HASIL SENDIRI Rp. 540.450.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 215 m2/50 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 40 m2/40 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000
11. Tanah Seluas 820 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL



SENDIRI Rp. 164.000.000

12. Tanah Seluas 712 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL

SENDIRI Rp. 213.600.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

3.400.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI

Rp. 3.400.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

D. SURAT BERHARGA

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

2.890.495**F. HARTA LAINNYA**

Rp.

Sub Total

Rp.

6.297.040.495**III. HUTANG**

Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

6.297.040.495

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : DINAS KETAHANAN PANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NANANG IRAWAN**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **240010**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.425.000.000
1. Tanah Seluas 5.743 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
2. Tanah Seluas 2.701 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000		
3. Tanah Seluas 3.614 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000		
4. Tanah Seluas 1.700 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 295 m2/345 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	252.500.000
1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000		
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	17.000.000
D. SURAT BERTAHAPAN	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	15.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.710.000.000



III. HUTANG

Rp. 127.033.552

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.582.966.448

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : DINAS KETAHANAN PANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **WIWI YULYANI SAPTAWIANTI**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **278840**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.395.984.360**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/104 m2 di KAB / KOTA LEBAK, HASIL SENDIRI Rp. 482.000.000
4. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 24 m2/20 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 363.984.360
6. Tanah dan Bangunan Seluas 389 m2/135 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **444.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER TRD Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
3. MOBIL, TOYOTA RAIZE Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **180.650.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	81.852.534
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.102.486.894
III. HUTANG	Rp.	485.426.961
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.617.059.933

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : DINAS KETAHANAN PANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABDUL HARIS**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **258899**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	650.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/200 m2 di KAB / KOTA LEBAK, Rp. 650.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	275.000.000
1. MOBIL, TOYOTA INOVA/ MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
2. LAINNYA, MAXPUMP AIR SATELIT MANUAL/ 3SJM 2,5/8 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
3. MOTOR, HONDA R2 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	109.250.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	46.454.122
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.080.704.122
III. HUTANG	Rp.	537.078.151
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	543.625.971

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



memenuhi kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DUDI HERDIAWAN**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **433280**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.464.600.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 101 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 236 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000		
3. Tanah Seluas 1.213 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.043.180.000		
4. Tanah Seluas 897 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 771.420.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	114.500.000
1. MOBIL, HONDA JAZZ RS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000		
2. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 CC Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA BBS-R M/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 36.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	6.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	853.264.112
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.438.364.112



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

4.438.364.112

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.